

ANALISIS FAKTOR DOMESTIK TERHADAP KEGAGALAN NORMALISASI HUBUNGAN ARMENIA-TURKI LEWAT PROTOKOL ZURICH

Syamas Akbar Satrio Kuncoro
Universitas Airlangga, Surabaya

Abstrak

Semenjak kemerdekaan Armenia ditahun 1993, terjadi dinamika hubungan yang kontradiktif antara Armenia dan Turki. Namun yang menjadi menarik ialah ditahun 2007 dunia internasional dikejutkan dengan adanya inisiasi kebijakan normalisasi antara Armenia dengan Turki. Hingga pada tahun 2009 ada dua momen penting dalam hubungan kedua negara yang sebelumnya kontradiktif, pertama membangun hubungan diplomatik dan membuka perbatasan antara Armenia dan Turki. Kedua, Armenia dan Turki ingin meratifikasi Protokol di Zurich yang bertujuan untuk menormalisasikan hubungan diplomatik. Menjadi sebuah pertanyaan disaat seluruh persiapan normalisasi sudah rampung Ratifikasi Protokol Zurich pun ditunda. Hipotesis yang muncul dalam penelitian adalah telah muncul upaya dalam rangka menormalisasi hubungan diplomatik Armenia dengan Turki yang telah membeku selama belasan tahun didasari oleh berbagai desakan atas kebutuhan kedua belah pihak baik Armenia maupun Turki. Namun dengan adanya berbagai dinamika yang ada dalam politik domestik kedua negara menyebabkan kegagalan upaya normalisasi ini yang ditandai oleh tidak diratifikasinya Protokol Zurich oleh parlemen kedua negara.

Kata Kunci: Normalisasi, Diplomasi Sepak Bola, Perubahan Kebijakan Luar Negeri, Armenia, Turki

Since Armenia's independence in 1993, there has been a dynamic contradictory relationship between Armenia and Turkey. But what is interesting is that in 2007 the international world was shocked by the initiation of normalization policies between Armenia and Turkey. Until 2009 there were two important moments in the relations of the two previously contradictory countries, first establishing diplomatic relations and opening the border between Armenia and Turkey. Second, Armenia and Turkey want to ratify the Protocol in Zurich which aims to normalize diplomatic relations. Being a question when all preparations for normalization have finished, the Ratification of the Zurich Protocol was postponed. The hypothesis that emerged in this paper was that efforts had been made in order to normalize Armenian and Turkish diplomatic relations which had frozen for a dozen years based on various demands for the needs of both the Armenian and Turkish parties. However, with the various dynamics that exist in the domestic politics of the two countries, the failure of this normalization effort was marked by the non-ratification of the Zurich Protocol by the two countries' parliaments.

Key Words: Normalization, Football Diplomacy, , Changes in Foreign Policy, Armenia, Turkey

Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet menjadi awal baru dari perkembangan dunia internasional, terutama dengan munculnya berbagai negara baru yang merdeka dari belenggu Uni Soviet sebelumnya, termasuk kehadiran Republik Armenia yang menjadi negara merdeka pada bulan November 1991. Turki sebagai negara tetangga Armenia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Armenia yang baru merdeka, sebuah negara yang memiliki perbatasan sepanjang 268 km, walaupun pada saat itu tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara (Gorgulu 2008). Meski begitu dalam lebih dari empat belas tahun yang telah berlalu sejak saat itu, tidak ada hubungan diplomatik antara Armenia dan Turki. Hal ini sendiri dipicu oleh campur tangan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh yang berada diperbatasan antara Armenia dan Azerbaijan. Turki sendiri merupakan begara sahabat bagi Azerbaijan, sengan adanya semangat *one nation, two countries* yang dimiliki oleh kedua negara, sehingga Turki turut memberi dukungan kepada Azerbaijan terkait konflik perebutan wilayah teritori antra Armenia dan Azerbaijan, di wilayah Nagorno-Karabakh.

Dengan terjadinya konflik Nagorno-Karabakh membuat hubungan Armenia-Turki secara bertahap semakin memburuk, terutama saat militer Armenia terus melakukan intervensi di wilayah Nagorno-Karabakh. Süleyman Demirel sebagai perdana menteri Turki menentang intervensi tersebut, dengan mengatakan bahwa masuknya Turki ke dalam perang akan memicu konflik Muslim-Kristen yang lebih besar dari pada Perang Salib (Gorgulu 2008). Dengan adanya hal ini sendiri Turki memutuskan untuk tidak mengirim pasukan untuk membantu Azerbaijan, namun memberi Azerbaijan bantuan militer dan penasihat. Turki kemudian mensponsori Resolusi Dewan Keamanan PBB 822 yang menegaskan Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari integritas teritorial Azerbaijan dan menuntut agar pasukan Armenia mundur dari Kelbajar. Setelah berlakunya resolusi pada tanggal 30 April 1993 Turki bergabung dengan Azerbaijan dalam memberlakukan embargo ekonomi ke Armenia dan perbatasan antara kedua negara ditutup. (Hale 2000).

Masalah lain yang membawa hubungan Armenia-Turki manjadi rumit adalah tuduhan genosida kepada Turki. Salah satu tujuan utama kebijakan luar negeri Armenia adalah pengakuan genosida diarena internasional. Hal tersebut pada akhirnya sangat mengganggu Turki. Di sisi lain, orang harus ingat bahwa orang- orang diaspora Armenia berusaha keras untuk mendorong tuduhan genosida diparlemen negara-negara pihak ketiga dalam upaya untuk memberikan isu Genosida menjadi sengketa internasional. Mengingat bahwa Armenia memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang sangat terbatas di arena internasional; hal tersebut membawa perpanjangan internasional diaspora Armenia yang berada di berbagai negara terutama di AS Serikat cukup berpengaruh. Setelah diadopsinya deklarasi kemerdekaan Armenia pada tahun 1992 oleh parlemen Armenia, parlemen menetapkan bahwa 'Republik Armenia berdiri untuk mendukung tugas untuk mencapai pengakuan internasional atas Genosida 1915 di Turki Ottoman dan Armenia Barat (Safrasttayan 2008). Penggunaan kata-kata tersebut menyebabkan memanasnya politik dalam negeri Armenia. Hal tersebut dikarenakan ungkapan ini mendapat kritik dari berbagai kelompok karena menciptakan musuh bagi negara yang baru berdiri. Armenia tidak merubah posisinya mengenai Genosida yang dialaminya dan upayanya dalam melakukan pengakuan genosida yang dilakukan oleh Turki pun semakin semakin besar.

Kejelasan hubungan antara kedua negara mulai menemukan titik temu ketika Presiden Armenia Serzh Sargsyan dilantik, Dalam periode pertama Presiden Armenia Serzh Sargsyan yang dilantik pada 17 April 2007, mendapatkan desakan untuk segera

melakukan normalisasi hubungan diplomatik Armenia-Turki. Dalam merespon desakan tersebut, Sargsyan melakukan langkah dengan melakukan *soft politics* kepada Turki dengan cara melakukan diplomasi sepak bola. Pada 22 April 2007, otoritas asing Turki membuat pernyataan resmi tetapi singkat bahwa kesepakatan telah dicapai untuk persiapan "Road Map" oleh mediasi Swiss

Dialog tentang pemulihan hubungan diplomatik antara Turki dan Armenia menjadi sorotan kembali saat pertengahan tahun 2008 dalam kerangka "Diplomasi Sepak Bola". Hal tersebut ditunjukkan pada bulan Juli 2008, Presiden Armenia Serzh Sargsyan menyampaikan undangan publik kepada, Presiden Turki Abdullah Gul, untuk menghadiri pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2010 antara tim sepak bola Armenia dan Turki yang diselenggarakan di ibukota Armenia pada bulan September 2008. Merespon undangan yang diberikan Presiden Armenia, Abdullah Gül untuk mengunjungi Armenia pun mengunjungi Armenia. Dalam kunjungan tersebut kedua pihak melakukan negosiasi serta menghadiri pertandingan sepak bola antara tim Armenia dan Turki. Selama pertemuan kedua pihak menyatakan kesiapan untuk melakukan negosiasi ekstensif yang diikuti dengan menyusun protokol khusus.

Undangan dan kunjungan berikutnya oleh presiden Turki tersebut menyusul berbulan-bulan rapat tertutup tertutup antara pejabat Armenia dan Turki di Swiss. Perundingan tersebut diadakan bertujuan untuk beberapa hal: 1). menempa pemahaman awal tentang masalah yang membelah kedua belah pihak; 2). Mengirim diplomat ke Tbilisi oleh Turki dan Armenia berdasarkan prinsip mutualitas; 3). Memastikan pembukaan representasi diplomatik di Ankara dan Yerevan.

Pada 10 Oktober 2009, Menteri Luar Negeri Armenia dan Turki menandatangani protokol yang disebut sebagai Protokol Zurich. Dalam sebuah upacara penandatanganan yang diadakan pada 10 Oktober 2009, para menteri luar negeri kedua belah pihak dan pihak-pihak lain yang berpartisipasi sebagai pihak ketiga menandatangani Protokol Zurich. Namun kemudian protokol ini mensyaratkan ratifikasi dari parlemen kedua negara. Permasalahan baru pun muncul disaat adanya upaya untuk mengatasi masalah sebelumnya. Muncul suatu perselisihan dalam kesepakatan atas formulasi yang tidak dapat diterima oleh parlemen kedua negara, baik Armenia maupun Turki. Terdapat dua faktor mengapa Armenia tidak meratifikasi Protokol Zurich tersebut, pertama, protes tak hanya dilayangkan dari parlemen saja, protes pun muncul dari Diaspora Armenia yang berada diseluruh dunia. Dalam sudut pandang diaspora Armenia, dalam konsensi yang membahas isu Genosida Armenia dan perbatasan Armenia-Turki, memiliki kesepakatan konsensi yang kontroversial. Kedua, Perdana Menteri Turki Erdogan yang berulang kali berbicara bahwa ratifikasi Turki tergantung pada kesepakatan damai dalam konflik Nagorno-Karabakh. Pada akhirnya, parlemen Armenia memutuskan untuk meminta Presiden Armenia untuk menangguhkan proses ratifikasi. Mengutip langsung pernyataan Presiden Armenia pada 22 April 2010 yang mengatakan:

“Considering the Turkish side's refusal to fulfill the requirement to ratify the accord without preconditions in a reasonable time, making the continuation of the ratification process in the national parliament pointless, we consider it necessary to suspend this process”

“The political majority in the National Assembly considers statements from the Turkish side in recent days as unacceptable, specifically those by Prime Minister Erdogan, who

has again made the ratification of the Armenia-Turkish protocols by the Turkish parliament directly dependent on a resolution over Nagorno-Karabakh”

Pada hari yang sama Presiden Sargsyan menanggukkan proses ratifikasi meskipun mengumumkan, bahwa Armenia tidak menanggukkan proses normalisasi hubungan dengan Turki secara keseluruhan.

Dinamika Politik Domestik Turki dalam Merespon Protokol Zurich

Arah diplomatik baru Turki menjadi fokus utama yang terjadi pada kasus ini. ' Pro-active foreign policy making' atau 'zero-problems with neighbours" telah menjadi ungkapan yang menentukan kebijakan luar negeri Turki saat ini yang mencakup peran sebagai pusat energi dan aliansi peradaban juga telah memasuki kebijakan luar negeri Turki. Tentu saja, proses pemulihan hubungan dengan Armenia merupakan bagian penting dari aktivisme baru ini dan juga sebagai ujian bagi doktrin *zero-problems with neighbours*. Dengan kata lain, perubahan terbaru dalam hubungan Turki-Armenia perlu dievaluasi sejalan dengan kebijakan luar negeri baru Turki. Bagian ini fokus pada debat domestik saat ini tentang pemulihan hubungan dengan Armenia di Turki.

Ada kesepakatan di Turki bahwa hubungan dengan Armenia tidak boleh dinormalisasi dengan mengorbankan hubungan dengan Azerbaijan. Memang, di antara kritik terhadap protokol, salah satu masalah yang paling diperdebatkan adalah tidak adanya referensi ke Nagorno-Karabakh. Sementara ketidakhadiran isu ini mungkin telah ditafsirkan di Armenia sebagai bukti Turki tidak lagi melihat Nagorno-Karabakh sebagai prasyarat untuk normalisasi hubungan, pada kenyataannya, pemerintah, oposisi dan publik Turki sepakat bahwa pemulihan hubungan dengan Armenia seharusnya tidak merusak hubungan dengan Azerbaijan. Penekanan Perdana Menteri Erdoğan pada hubungan antara ratifikasi protokol dan normalisasi hubungan Armenia-Azerbaijan disambut dengan kekecewaan di Armenia. Memang, beberapa pejabat Turki telah mengulangi bahwa hubungan antara Armenia dan Azerbaijan harus lebih matang sebelum ratifikasi protokol diperdebatkan di Parlemen Nasional Turki, dimana tanda tangan protokol banyak dipengaruhi oleh posisi Azerbaijan yang kaku mengenai hubungan Turki-Armenia. Sederhananya, konflik Karabakh masih menjadi masalah yang bisa menghalangi normalisasi hubungan antara Turki dan Armenia (Gorgulu et al 2010).

Pemulihan hubungan Turki-Armenia secara luas dianggap di Azerbaijan sebagai pengkhianatan terhadap prinsip utama yang menjadi dasar kemitraan antara Turki dan Azerbaijan, yaitu bahwa tidak ada kesepakatan antara Armenia dan Turki yang harus disepakati sampai penyelesaian konflik Nagorno Karabakh. Solidaritas antara elit politik Turki dan Azerbaijan disini cenderung diuji oleh adanya proses normalisasi dengan Armenia, dimana solidaritas ini yang menjadi hambatan serius terkait jalanya normalisasi. Solidaritas ini sebelumnya telah menginisiasikan penutupan perbatasan tanah antara Turki dan Armenia pada 1993 setelah diperburuknya pertikaian antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh. Itulah sebabnya, setelah penandatanganan protokol, elit politik Turki segera mengulangi niat mereka untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Armenia kecuali jika ada kemajuan yang signifikan menuju penyelesaian konflik (Esayan 2009). Pemerintah Turki menghubungkan proses penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh dengan normalisasi hubungan Turki-Armenia ditegaskan oleh oposisi dan opini publik Turki. Di sisi lain, komunitas internasional dan

Armenia menentang hubungan semacam itu antara kedua masalah ini, dengan alasan bahwa ini adalah dua proses terpisah. Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov menggarisbawahi bahwa Rusia tidak melihat hubungan apa pun antara penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh dan normalisasi hubungan Turki-Armenia dimana hal ini dapat dilihat dari peran aktif Rusia yang turut aktif dalam proses normalisasi sebagai pihak ketiga.

Selain faktor-faktor ideasional, kepentingan material juga memiliki peran penting dalam hubungan Turki-Azerbaijan. Jika Turki ingin mencapai tujuannya menjadi pusat energi di wilayah Kaukasus Selatan, Azerbaijan adalah negara paling penting di Transcaucasus. Menurut Wakil Sekretaris Negara untuk Perdagangan Luar Negeri, terdapat peningkatan 261% dalam ekspor minyak dan gas alam Azerbaijan ke Turki dari \$ 222 juta pada 2007 menjadi \$ 802 juta pada 2008. Investasi Turki di negara ini di sektor-sektor seperti energi, konstruksi dan perbankan sangat besar, dimana Turki menginvestasikan \$ 182 juta pada 2008 (Gorgulu et al. 2010) Turki berinvestasi lebih banyak di industri non-minyak Azerbaijan daripada negara lain. Namun hubungan Turki dengan Azerbaijan menjadi lebih bermasalah karena kebijakan energi Ankara dan pemulihan hubungan diplomatik dengan Armenia. Pidato Erdogan di Parlemen Azerbaijan pada Mei 2009 bertujuan untuk meyakinkan Azerbaijan tetapi tidak banyak membangun kepercayaan.

Azerbaijan disini khawatir bahwa dengan dibukanya perbatasan dan berakhirnya isolasi Armenia, Azerbaijan akan kehilangan pengaruh penting untuk mempengaruhi pembicaraan tentang status Nagorno Karabakh di masa depan. Setelah penandatanganan protokol Armenia-Turki, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa keputusan Turki secara langsung bertentangan dengan kepentingan nasional Azerbaijan dan membayangi semangat hubungan persaudaraan antara Azerbaijan dan Turki yang dibangun di atas akar sejarah yang dalam (Mikhelidze 2010).

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev bereaksi keras terhadap pemulihan hubungan Turki-Armenia, mengancam akan menaikkan harga jual sumber daya energi Azerbaijan ke Turki. Memang, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 2002 antara Azerbaijan dan Turki, Baku telah menjual gasnya ke Turki dengan harga \$ 120 per seribu meter kubik atau sepertiga harga pasar (Mikhelidze 2010). Perjanjian telah berakhir dan negosiasi baru telah dimulai antara para pihak. Namun, sementara itu, Turki terus membayar harga yang sama untuk impor gas dari Azerbaijan.

Selain itu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliev juga memperkuat kesan pendinginan serius dalam hubungan Turki-Azerbaijan. Deklarasi Aliev bahwa negaranya mempertimbangkan rute alternatif ke pipa Nabucco yang akan memotong wilayah Turki akan menjadi perhatian serius ke Ankara, dengan kata lain, Azerbaijan secara serius mempertimbangkan mengurangi ketergantungannya yang berlebihan pada Turki dalam ekspor sumber daya alamnya. Turki juga merupakan mitra dagang terbesar kedua Azerbaijan, dimana volume perdagangan antara Turki dan Azerbaijan meningkat dari 92 juta dolar pada 1994 menjadi 279 juta dolar pada 1996 dan menjadi 2,55 miliar dolar pada 2008. Alasan utama dalam memburuknya hubungan Turki-Azerbaijan adalah pemulihan hubungan antara Turki dan Armenia (Gorgulu et al 2010). Konsep "Satu bangsa, dua negara" tidak lagi membingkai hubungan antara Baku dan Ankara. Dari perspektif ini, normalisasi hubungan Turki-Armenia tidak hanya mengancam hubungan persaudaraan

antara Turki dan Azerbaijan tetapi juga hubungan ekonomi mereka. Di sisi lain, mentalitas zero sum game yang mendominasi hubungan bilateral di kawasan ini tidak menjadi perhatian siapa pun; solusi win-win adalah kemungkinan yang berbeda. Normalisasi hubungan Turki-Armenia akan menciptakan peluang baru dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Kaukasus Selatan, dimana normalisasi sebenarnya dapat berkontribusi pada resolusi damai konflik Nagorno- Karabakh, yang saat ini merupakan hambatan terbesar bagi perdamaian dan kemakmuran di wilayah tersebut.

Dengan adanya desakan dari Azerbaijan dalam proses normalisasi membuat adanya tanda konflik dalam protokol yang terjadi segera setelah protokol ditandatangani. Pada kongres partai di Ankara pada 12 Oktober 2009, Erdogan mengatakan bahwa “Turki tidak dapat mengambil langkah positif terhadap Armenia kecuali jika Armenia menarik diri dari tanah Azerbaijan, jika masalah itu diselesaikan rakyat kita dan parlemen kita akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap ini protokol dan proses ini.”. Niat Erdogan yang mungkin adalah bermain untuk pandangan domestik Turki dan untuk menenangkan oposisi, yang mengkritik keras protokol. Memang, hubungan dengan Azerbaijan adalah masalah politik domestik di Turki, terutama jika dilihat dalam konteks pemulihan hubungan dengan Armenia.

Di sisi lain, reaksi Armenia terhadap pernyataan Erdogan tetap teguh, menggarisbawahi fakta bahwa baik kata Karabakh maupun Azerbaijan tidak muncul dalam protokol. Komunitas internasional juga menyatakan keprihatinannya pada menghubungkan ratifikasi protokol dengan proses perdamaian Karabakh. Baik AS dan Rusia menyatakan bahwa negosiasi perdamaian Karabakh dan pemulihan hubungan Turki-Armenia adalah proses yang terpisah. (Taşpınar 2010). Setelah krisis pertama ini, kedua belah pihak telah secara terbuka menyatakan niat mereka untuk menunggu pihak lain bertindak terlebih dahulu.

Secara prosedural prosesnya serupa di kedua negara, dimana Turki dan Armenia membutuhkan persetujuan parlemen nasional masing-masing untuk mengimplementasikan protokol. Namun, Mahkamah Konstitusi Armenia juga harus setuju bahwa protokol tersebut sesuai dengan konstitusi negara sebelum parlemen memiliki kesempatan untuk menyetujuinya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyetujui protokol pada 12 Januari 2010 dan dengan demikian menolak klaim bahwa beberapa ketentuan yang terkandung dalam dokumen tidak konstitusional. Namun keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi penyebab frustrasi di Ankara. Pada tanggal 18 Januari Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa: “keputusan ini berisi prasyarat dan ketentuan restriktif yang merusak surat dan semangat protokol” Kekecewaan Kementerian dibagi oleh Pemerintah Turki; Erdogan mengatakan bahwa referensi Pengadilan terhadap ‘pembunuhan orang-orang Armenia’ dan konflik antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh adalah masalah: “Ini akan menantang proses tersebut kecuali kesalahan diperbaiki. Ini jelas tidak dapat diterima di Turki”.

Reaksi resmi Turki berasal dari dua putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah referensi yang dibuat untuk Pasal 11 Deklarasi Kemerdekaan Armenia, dimana Pengadilan menggarisbawahi bahwa klausul dalam protokol tidak dapat bertentangan dengan Pasal 11 yang menyatakan bahwa Armenia akan mendukung tugas untuk mencapai pengakuan internasional atas genosida 1915 yang dilakukan oleh Turki-Ottoman di Armenia Barat.

Menurut pejabat Turki, interpretasi ini menggerogoti sub-historis yang diusulkan, komisi ditugasi menyelidiki sifat peristiwa 1915. Masalah kedua Turki terkait dengan keputusan keempat Mahkamah, yang menyatakan bahwa “perjanjian internasional hanya dapat memiliki efek hukum di Armenia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Konstitusi Armenia, dengan tetap memperhatikan keabsahannya dalam hukum internasional dan menjadi bagian dari sistem hukum Armenia dalam prosedur yang ditentukan oleh konstitusi” (Erdogan 2010). Pejabat Turki mengambil ini sebagai bagian dari masalah protokol karena itu tidak mengakui Perjanjian Kars tahun 1921. Ekspresi keengganan Armenia untuk mengakui integritas wilayah Turki. Reaksi resmi Turki mendapat tanggapan beragam. Beberapa analis Turki menemukan posisi Turki di atas, dengan alasan bahwa proses tersebut telah diblokir oleh Turki karena menghubungkan ratifikasi dengan proses perdamaian Karabakh (Guven 2010) Yang lain berpendapat bahwa reaksi resmi Turki sama seperti yang diperkenalkan Mahkamah Konstitusi Armenia. beberapa ketentuan restriktif yang bertentangan dengan semangat protokol.

Singkatnya, hal tersebut menunjukkan bahwa ratifikasi bermasalah, disisilain komunitas internasional mengharapkan ratifikasi yang cepat di kedua sisi. Namun Turki maupun Armenia belum menunjukkan antusiasme yang diperlukan. Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) ragu untuk membahas protokol di parlemen karena mereka khawatir tentang reaksi publik yang potensial dan, mungkin lebih penting, bahwa mungkin tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pembicaraan. Tidak mengherankan adanya tendensi untuk mempercepat proses. Erdogan ditugaskan Wakil Menteri Luar Negeri Feridun Sinirlioğlu sebagai perwakilan khusus dan mengirim surat ke Sargsyan. Kemudian kedua pemimpin bertemu di Washington D.C. pada 12 April untuk membahas surat ini serta situasi saat ini. Sepuluh hari kemudian Presiden Sargsyan menyatakan bahwa Armenia telah memutuskan untuk membekukan ratifikasi protokol Zurich. Deklarasi ini tidak mengejutkan dan karena itu para pejabat Turki merespons dengan tenang. Davutoğlu menggarisbawahi hal ini dengan mengatakan: “Kami berharap kondisinya membaik dan prosesnya berlanjut lagi. Kami melihat proses ini sebagai proses yang akan bermanfaat bagi seluruh wilayah. Tidak ada yang berubah untuk Turki” (Gorgulu et al. 2010). Faktanya Turki melihat penangguhan sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali seluruh proses dan mengembangkan strategi baru untuk mengatasi kesulitan mereka. Banyak investasi politik telah dihabiskan dalam memberikan protokol dan ini tidak boleh disia-siakan.

DINAMIKA POLITIK DOMESTIK ARMENIA DALAM MERESPON PROTOKOL ZURICH

Sejak kemerdekaan Armenia, tidak ada masalah kebijakan luar negeri lainnya, kecuali daerah Nagorno-Karabakh, yang memiliki resonansi diantara masyarakat Armenia dan Diaspora selain terhadap isu pemulihan hubungan dengan Turki. Sikap terhadap penandatanganan protokol bervariasi dari penolakan kuat hingga adanya optimisme mengenai normalisasi hubungan kedua negara. Namun sikap negatif lebih menonjol, dimana sebagian besar masyarakat Armenia, dengan proporsi diaspora yang lebih besar dan segmen elit politik percaya protokol tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Bahkan kritikus paling moderat menuduh pemerintah Armenia membuat terlalu banyak konsesi.

Hingga tahun 2009, ada dua faktor utama mempengaruhi opini Armenia tentang Turki. Pertama adalah memori tragedi 1915, dibuat pahit oleh kebijakan penolakan Turki. Kedua adalah dukungan Turki untuk Azerbaijan dalam konflik atas Nagorno-Karabakh (Gorgulu et al 2010). Dengan kondisi perbatasan yang tertutup, warga Armenia rata-rata menganggap Turki dan Armenia sebagai negara yang bermusuhan, seperti Kekaisaran Ottoman dan bukan tetangga seperti sekarang. Karena rasa ketidakpercayaan yang umum ini, pembicaraan Turki- Armenia yang dimediasi Swiss dirahasiakan selama beberapa saat. Memang, kejutan pada publikasi hasil pertama mereka pada bulan April 2009 terlihat jelas. Dashnaksutyun sebagai salah satu partai yang berkuasa di Armenia, bahkan meninggalkan koalisi pemerintah sebagai protes terhadap pemulihan hubungan, setelah pernyataan bersama tentang road map Armenia-Turki yang dikeluarkan. Protokol Zurich, yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus dan ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2009, menimbulkan kritik yang bahkan lebih kuat di media dan di masyarakat luas. Namun, masalah yang sudah berlangsung lama dan bukan isi perjanjian Turki-Armenia adalah alasan utama untuk reaksi yang penolaka ini, terdapat tiga alasan utama di sini:

Yang pertama adalah konservatisme: lebih dari dua dekade, orang Armenia telah terbiasa dengan tata ruang politik regional dan takut akan perubahan. Yang kedua adalah ketidakpercayaan. Banyak orang Armenia percaya bahwa Turki tidak jujur dalam negosiasi dengan Armenia; ada kekhawatiran yang meluas bahwa masalah Nagorno-Karabakh telah dimasukkan dalam perjanjian Armenia-Turki dalam beberapa cara. Ketakutan ini sampai pada taraf tertentu dihilangkan oleh komentar Erdogan di Washington, di mana ia mengatakan bahwa protokol tidak mengandung referensi ke Nagorno-Karabakh. Namun, ia kemudian mengatakan bahwa Parlemen Turki tidak akan meratifikasi protokol kecuali beberapa kemajuan dibuat di Nagorno-Karabakh. Yang ketiga dihasilkan dari kurangnya pemahaman tentang motif Turki. Upaya Turki untuk menormalkan hubungan dengan Armenia sebagian berasal dari hubungannya dengan Uni Eropa (UE) dan AS. Orang Armenia pada umumnya tidak menyadari bahwa Turki membuat konsesi di Timur dengan maksud untuk mendapatkan dividen di wilayah Barat (Gorgulu et al 2010).

Ketika Turki memberikan klausul tambahan terhadap protokol Zurich untuk mengaitkannya dengan konflik Nagorno-Karabakh, Armenia menjawabnya dengan permintaan pengakuan Genosida. Masalah genosida sangat sensitif bagi orang Armenia baik di dalam maupun di luar negeri, tidak ada yang siap untuk membahas apakah genosida itu akurat atau tidak secara faktual. Bagi masyarakat Armenia, kompensasi kejahatan genosida Turki terhadap masyarakat Armenia dipandang sebagai suatu system hukum terhadap genosida masa depan. Untuk mengurangi rasa tidak aman masih dialami oleh banyak orang Armenia, pada akhir 1990-an Armenia mulai menerapkan kebijakan di mana klaim pengakuan genosida menjadi alat politik alternatif untuk memberikan tekanan politik pada Ankara (Safrastyan 2005). Ketika Turki menggunakan Nagorno-Karabakh sebagai sumber daya untuk menekan Armenia, Yerevan menjadikan genosida sebagai isu dalam membalik tekanan Ankara dalam kebijakannya. Namun banyak aktor di Armenia yakin bahwa dalam kerangka pemulihan hubungan, masalah Nagorno-Karabakh bukanlah prioritas bagi Ankara karena sejumlah alasan. Mereka percaya Turki hanya menggunakan masalah ini sebagai pengungkit perdagangan untuk mengurangi pengakuan internasional atas genosida (Gorgulu et al. 2010). Ketika Turki mengemukakan konflik atas Nagorno-Karabakh sebagai prasyarat untuk normalisasi hubungan, Armenia menguatkan sikapnya terhadap pengakuan genosida. Tekanan yang

diberikan oleh Diaspora pada pemerintah Barat dengan demikian menjadi sumber daya untuk mendorong Ankara menuju konsesi dalam proses normalisasi.

Disisi lain, Masalah Nagorno-Karabakh adalah salah satu pilar kebijakan luar negeri Armenia. Sebagian besar elit politik Armenia adalah mantan aktivis Karabakh, mantan kombatan, atau orang-orang dari Nagorno-Karabakh dan bagian-bagian Azerbaijan yang berpenduduk Armenia. Gerakan mendukung Nagorno-Karabakh yang dimulai pada akhir era Soviet tidak kalah pentingnya dengan perjuangan kemerdekaan Armenia melawan rezim komunis. Dua puluh tahun kemudian, Nagorno-Karabakh masih memiliki nilai eksistensial dalam pemikiran politik para elit Armenia. Memang, selama hampir dua dekade, Armenia telah siap untuk membayar harga yang sangat tinggi untuk kemerdekaan dan keamanan orang yang tinggal di Nagorno-Karabakh (Minasyan 2008)

Sikap ini bermula dari pengalaman perang pada 1990-an Nagorno- Karabakh sekarang memiliki pertahanan yang baik pada zona penyangga di sepanjang bekas perbatasan Soviet-Karabakh. Karena zona penyangga dan koridor Lachin yang menghubungkan Karabakh ke Armenia, jalur kontak potensial antara pasukan Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan jauh lebih pendek. Dengan menarik pasukannya dari salah satu daerah yang membentuk zona penyangga, Nagorno- Karabakh takut melemahkan pertahanannya dan memberi Baku harapan baru untuk solusi militer, dimana kekhawatiran ini diperkuat oleh fakta bahwa Azerbaijan sedang membangun anggaran militernya dan mengancam perang baru (Gorgulu et al. 2010) Nagorno Karabakh tidak siap untuk menurunkan pertahanannya kecuali pihak-pihak menandatangani perjanjian perdamaian akhir yang mendefinisikan status Nagorno-Karabakh berdasarkan saling kompromi dan menguntungkan. Bahkan, perbatasan yang dibentengi, dikombinasikan dengan potensi konflik tanpa kompromi dari komunitas internasional terhadap penyelesaian konflik dengan cara militer, sejauh ini tetap menjadi jaminan terbaik untuk tidak memperbarui permusuhan bersenjata di daerah tersebut.

Karena itu tidak mengherankan bahwa desakan Turki untuk menghubungkan normalisasi hubungan dengan Nagorno-Karabakh disambut dengan kekecewaan Armenia. Dalam sebuah pertemuan dengan para jurnalis Turki pada bulan Desember 2009, Menteri Luar Negeri Armenia Nalbandyan mengatakan bahwa seandainya normalisasi Turki-Armenia awalnya dikaitkan dengan konflik atas Nagorno-Karabakh, pemulihan hubungan tidak akan pernah dimulai. Kata- katanya menggambarkan pengertian di pihak Armenia bahwa upaya untuk menyatukan keduanya akan sangat merusak. Baik deklarasi Road Map maupun protokolnya tidak menyebutkan Nagorno-Karabakh. Upaya untuk mengajukan persyaratan tambahan untuk ratifikasi protokol hanya meningkatkan ketidakpercayaan Armenia terhadap Turki sebagai mitra yang dapat diandalkan. Pada dasarnya, pihak Armenia khawatir bahwa menghubungkan normalisasi dengan Nagorno-Karabakh menempatkan proses yang telah dilakukan sebelumnya dalam bahaya.

Sementara itu, Turki sadar akan alasan reaksi Azerbaijan terhadap pemulihan hubungan Turki-Armenia yang mengarah ke serangkaian krisis dalam hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Turki. Memang, normalisasi diharapkan bermanfaat bagi Armenia dan karenanya, menurut logika zero-sum pun akan berdampak pada Azerbaijan. Aktor-aktor di Armenia sadar bahwa Turki berusaha menangani masalah-masalahnya dengan secara teratur meyakinkan Azerbaijan bahwa pemulihan hubungan dengan Armenia akan sedikit banyak tergantung pada penyelesaian konflik atas Nagorno-Karabakh. Pemikiran

Armenia disini adalah bahwa kemajuan di Karabakh sangat dibutuhkan tetapi menghubungkannya dengan hubungan Turki-Armenia tidak mungkin berhasil (Iskandasryan 2009). Jelas kontraproduktif untuk menganggap hubungan Turki-Armenia dan Azerbaijan- Turki sebagai permainan zero-sum, di mana pemulihan hubungan dengan Armenia berakibat pada memburuknya hubungan dengan Azerbaijan. Permainan zero sum bukanlah model satu-satunya yang dapat bekerja di segitiga Armenia-Azerbaijan- Turki. Menurut Armenia, Azerbaijan tidak dapat membahayakan hubungannya dengan Turki karena ini akan membuat ruang manuvernya lebih sedikit dalam hubungannya dengan Rusia. Proyek-proyek komunikasi dan transportasi bahan bakar Baku-Tbilisi-Jeyhan dan Baku-Erzurum yang membutuhkan waktu begitu lama untuk persiapan dan implementasi tidak dapat dihentikan dalam semalam, dimana hal ini membuat Azerbaijan dan Turki saling bergantung. Yang paling penting, pembukaan perbatasan Turki-Armenia dapat mengurangi situasi keseluruhan di wilayah tersebut dan pada akhirnya menguntungkan semua pemain regional. Lagipula, Azerbaijan mempertahankan hubungan bertetangga yang baik dengan Rusia yang memiliki pangkalan militer di Armenia, bersekutu dengannya di Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan memberikannya bantuan militer. Beberapa kekecewaan tidak akan terhindarkan, tetapi Azerbaijan tidak bisa memiliki hubungan yang bermasalah dengan Turki.

Tertundanya ratifikasi akan memicu terhambatnya langkah-langkah normalisasi secara konkret, mulai dengan pembukaan perbatasan dalam waktu dua bulan hingga pembentukan hubungan diplomatik. Namun, seseorang tidak dapat mengesampingkan bahwa meskipun prosedur normalisasi secara jelas dijabarkan dalam protokol, sebenarnya akan diperlambat dan diperumit oleh masalah teknis yang mungkin ditimbulkan oleh masing-masing pihak. Masalah potensial apa pun seharusnya tidak mencegah negara untuk melanjutkan pemulihan hubungan, karena penangguhannya atau timbal baliknya akan mengarah pada situasi lose-lose. Jika ratifikasi gagal, akan sangat sulit bagi kedua negara, dan terutama Armenia, untuk melanjutkan normalisasi.

Kesimpulan

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, bahwa ada dua isu utama, yang menjadi hambatan dalam normalisasi hubungan antara Armenia dan Turki dimana harapan di kedua negara sangat berbeda, dan isi protokol dipandang tidak memenuhi ekspektasi kedua belah pihak yang ditujukan untuk mengakomodasi interpretasi yang bertentangan. Terjadi beberapa proses disintegrasi yang tiga momen utama yang kemudian menggagalkan keberlanjutan proses normalisasi. Proses Disintegrasi pertama yang terjadi paska upacara penandatanganan protokol, pada 2009 ketika Menteri Luar Negeri Armenia Vartan Oskanian keberatan dengan protokol yang mengarah ke arah yang tidak diharapkan oleh pihak pemerintah Armenia terkait masalah Nagorno-Karabakh. Disisi lain Ankara pada 12 Oktober 2009, Erdogan mengatakan berpendapat bahwa Turki tidak dapat mengambil langkah positif terhadap Armenia kecuali jika Armenia menarik diri dari tanah Azerbaijan.

Proses disintegrasi selanjutnya yang memecah proses adalah keputusan Mahkamah Konstitusi Armenia, yang menerima protokol pada bulan November 2009 untuk

mengevaluasi isi protokol terhadap konstitusi yang berlaku. Pada 12 Januari 2010, putusan positif dikeluarkan, menegaskan bahwa protokol tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun dengan adanya pernyataan Erdogan mengenai isu Nagorno-Karabakh, pihak Armenia membalas dengan Menteri Luar Negeri Armenia Nalbandyan mengatakan bahwa seandainya normalisasi Turki-Armenia awalnya dikaitkan dengan konflik atas Nagorno-Karabakh, pemulihan hubungan tidak akan pernah dimulai. Disisi lain Armenia juga membalas dengan pernyataan seruan pengakuan genosida yang sesuai ketentuan mukadimah Undang-Undang Dasar Republik Armenia dan persyaratan Paragraf 11 Deklarasi Kemerdekaan Armenia 1990. Paragraf 11 Deklarasi yang disebutkan secara eksplisit berbunyi: Republik Armenia mendukung tugas untuk mencapai pengakuan internasional atas genosida 1915 di Turki Ottoman dan Armenia Barat. Pada 18 Januari 2010, kementerian luar negeri Turki merespon tindakan Armenia dengan menyatakan bahwa keputusan ini berisi prasyarat dan ketentuan yang membatasi yang merusak surat dan semangat Protokol. Keputusan tersebut merongrong alasan untuk menegosiasikan Protokol ini serta tujuan fundamental Armenia. Pendekatan Armenia terkait prasyarat resolusi konflik tidak bias diterima oleh Turki., dan sejak itu, prosesnya telah dibekukan.

Disini dapat dilihat bahwa Protokol Zurich gagal dalam memperhitungkan dua keadaan utama. Yang pertama dalam menangani isu genosida dimana ketentuan tentang pembentukan sub-komisi sejarawan dalam meneliti terkait sejarah genosida Turki terhadap Armenia yang merupakan bukti fakta bahwa protokol tidak ditujukan untuk masa depan, sebagai gantinya melanjutkan "jalur sejarah" untuk mencapai penilaian umum di masa lalu, bukan untuk melakukan pengakuan aksi sebagaimana yang diharapkan oleh Armenia.

Kedua, faktor politik kekuasaan yang berkaitan dengan resolusi konflik di Nagorno-Karabakh yang dianggap menentukan dalam proses politik tidak menemukan jalan keluar. Armenia berusaha memisahkan masalah konflik Nagorno-Karabakh dari proses normalisasi Armenia-Turki, sementara bagi para pejabat di Ankara isu ini merupakan masalah yang tak terpisahkan. Sejak awal, Turki tidak berencana untuk mengimplementasikan Protokol Zurich kecuali jika ada kemajuan dalam proses perdamaian Nagorno-Karabakh. Meskipun masalah Nagorno-Karabakh tidak dimasukkan secara resmi ke dalam Protokol, Protokol tidak akan dapat muncul sejak awal, karena posisi Armenia bahwa masalah ini tidak boleh dikaitkan, hal itu itu jelas tetap menjadi prasyarat normalisasi. Ini adalah alasan penolakan terang-terangan Turki untuk meratifikasi Protokol, berbeda dengan para pejabat di Yerevan yang siap untuk ratifikasi dan implementasi tanpa adanya campur tanga isu yang menurut mereka tidak terkait terhadap kedua negara. Terkait hal sebelumnya, alasan Armenia untuk penangguhan proses adalah prasyarat yang diajukan Turki. Protokol, di sisi lain, ditengahi tanpa dasar prasyarat. Sisi Turki sama-sama menyalahkan Armenia karena menawarkan prasyarat untuk membalas prasyarat yang ditawarkan Turki. Prasyarat untuk Turki tersebut adalah kemajuan dalam penyelesaian konflik Nagorno Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Armenia cenderung melihat masalah ini terpisah dari pemulihan hubungan dengan Turki. Disisi lain, Prasyarat yang disebutkan untuk Armenia, adalah pengakuan peristiwa 1915 sebagai genosida, sebagaimana diajukan oleh Pengadilan Armenia. Akibatnya, proses pemulihan hubungan terputus, tetapi tidak sepenuhnya ditinggalkan, dimana Armenia hanya menunda proses ratifikasi dan Turki kemudian menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk itu. Namun, masalah ini menjadi semakin rumit karena secara virtual

terkait dengan konflik Nagorno Karabakh, sebagian besar berkat kebijakan tegas Azerbaijan.

Perkembangan semacam itu akan jelas mengarah ke ketidakjelasan terhadap pemulihan hubungan Armenia-Turki dan sangat mungkin membawanya kembali ke titik awal. Untuk menghindari ketegangan baru, kedua negara setidaknya harus mencoba untuk mempertahankan hubungan di tingkat saat ini dan menghindari merusaknya dengan pernyataan dan tindakan pejabat publik yang radikal yang tidak perlu. Sumber harapan adalah bahwa meskipun upaya untuk menormalkan hubungan diplomatik dan perbatasan terbuka belum berhasil, melacak dua diplomasi antara kedua masyarakat berjalan dengan baik dan telah mencapai tahap baru di mana hubungan bersama secara bertahap melepaskan warisan stereotip dan fobia. Bahkan seandainya "diplomasi sepakbola" terhenti atau bahkan mengarah pada kemunduran, hubungan antara aktor masyarakat sipil hampir tidak dapat diharapkan memburuk. Orang-orang Armenia dan Turki yang bekerja untuk mempromosikan rekonsiliasi melalui kontak, debat, dan pertukaran masyarakat sipil sekarang sudah melewati titik tidak bisa kembali.

Referensi :

Buku

- Brierly, Jl. 1963. *The Law of Nation: n Introduction to the International Law of Peace*. United Kingdom: Oxford University
- Brownlie, Ian. (1979). *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press
- Bubalo, Anthony. (2013) "Football Diplomacy Redux: The 2015 Asian Cup and Australia's Engagement with Asia.". Lowy Institute for International Policy.
- Djelantik, Sukawarsini. (2008). "Diplomasi antara Teori dan Praktik." Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dyatlov, Viktor & Eduard Melkonian. 2009. "Armenian Diaspora: Essays on Sociocultural Typology." Yerevan, Caucasus Institute.
- Eden, Jon Theis (2013). *Major Research Paper: Soccer and International Relations*. Univesity of Ottawa
- Freeman Jr., Chas W. 2010. *The Diplomat's Dictionary*. Washington, D.C: United States Institute of Peace Press
- Goldmann, K. 1988. *Change and Stability in Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press.
- Gorgulu, Aybars, et al. 2010. "Turkey-Armenia Dialogue Series: Assessing The Rapprochement Process". Istanbul: Tesev Publication
- Hale, William. 2000. "Turkish Foreign Policy: 1774–2000." United Kingdom: Routledge.
- Hovannisian, Richard pG, dan Simon, Payaslian. 2008. "Armenian Cicilia". California: Mazda Publisher.
- Iskandaryan. Alexander. 2008. "Caucasus Neighborhood: Turkey and the South Caucasus." Yerevan: Caucasus Institute.
- Minasyan, Sergey (2008) "Armenia in Karabakh, Karabakh in Armenia: The Karabakh Factor in Armenia's Foreign and Domestic Policy". Dalam Iskandaryan, Alexander. 2008. "*Caucasus Neighborhood: Turkey andthe South Caucasus*." Yerevan: Caucasus Institute.
- Mouna, Boer. 2000. "Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global." Bandung: Penerbit Alumni.
- Ospinova, Yelana, dan Fevzi Bilgin. 2013. "Revisiting The Armenian-Turkish Reconciliation." Washington D.C: Rethink Institute.

- Panossian, Rasmik. 2006. "Post-Soviet Armenia: Nationalism & Its (Dis)contents." dalam Barrington, Lowell. *After Independence: Making and Protecting the Nation in Postcolonial and Postcommunist States.* Michigan: University Michigan Press.
- Roy, S.L., (1991). *Diplomasi.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Safrastyan, Ruben. 2004. "Armenian-Turkish Relations: From Interstate Dispute to Neighborliness." New York: Open Society Institute.
- Satow, Ernest. 1957. *A Guide to Diplomatic Practice.* London: Longmans & Company.
- Smith, Roger. 2009. "The Politics of Genocide and the Turkey-Armenia Protocols" Zoryan Institute.
- Sorensen, Max. 1968. "Manual of Public International Law". London: Palgrave Macmillan.
- Ungor, Ugur Umit, et al. 2012. "Armenian Genocide: 1915." Dalam Haperen, Maria, et al. 2012. *The Holocaust and other genocides.* Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Waller, Michael.J. 2009. "Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare." Washington, DC: Institute of World Politics Press.

Artikel

- Birand, Mehmet Ali. 2009. "With the 'golden signature' the diaspora lost and Ankara won", *Hürriyet Daily*
- Giragosian, Richard. 2009. "Changing Armenia-Turkish Relations." [Online]. Dalam <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/06380.pdf> [Diakses pada 21 April 2019].
- Göskel, D Nigar. 2012. "Turkey and Armenia Post-Protocols: Back to Square One?" [Online]. Dalam http://tese.org.tr/wpcontent/uploads/2015/11/Turkey_And_Armenia_Post_Protocols_Back_To_Square_One_EN.pdf [Diakses pada 21 April 2019].
- Güven, Erdal (2010) "Protocols will do work." [Online]. Dalam <http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazarYazisi&ArticleID=975796&Yazar=ERDALGÜVEN&Date=21.01.2010&CategoryID=99#> [Diakses pada 17 April 2019].
- Gürcanlı, Zeynep. 2009. "What will the protocols with Armenia bring." [Online]. Dalam <http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=12663370> [Diakses pada 8 April 2019].
- Hovannisian, Raffi. 2008, "Forward to the Past: Russia, Turkey, and Armenia's Faith." [Online]. Dalam http://www.rferl.org/content/commentary_Russia_Turkey_Armenia/1331509.html [Diakses pada 18 April 2019].
- Hovhannisian, Raffi (2010) "No You Can't: Obama's Test and Turkey's Time." [Online]. Dalam <http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/03/20/no-you-can't-obama-s-test-and-turkey-s-time/> [Diakses pada 12 April 2019].
- Kanlı, Yusuf. 2009. "Making history." *Hürriyet Daily News*
- Kim, Hwajung. 2011. "Cultural Diplomacy as the Means of Soft Power in an Information Age". [Online]. Dalam <https://www.scribd.com/document/246089363/Cultural-Diplomacy-as-the-Means-of-Soft-Power-in-the-Information-Age> [Diakses pada 7 April 2019].
- Taşpınar, Ömer. 2010. "Crisis". [Online]. Dalam <http://sabah.com.tr/Yazarlar/taspinar/2010/01/25/kriz> [Diakses pada 28 April 2019].
- The Campaign. 2009. "Stop The Protocols." Dalam <http://www.stoptheprotocols.com>. [Diakses Pada 28 April 2019].

Jurnal

- Altınay, Hakan. 2008. "Turkey's Soft Power: An Unpolished Gem or an Elusive Mirage?" dalam *Insight Turkey, Vol. 10, No. 2.*
- Aras, Bulent. 2009. "Turkey and the Russian Federation: An Emerging Multidimensional Partnership." dalam *SETA Policy Brief, No.35.*

- Bengür, Osman. 2009. "Turkey's Image and the Armenian Question." dalam *Turkish Policy Quarterly*, Vol.8, No.1.
- Cohan, Sara. 2005. "A Brief History of The Armenian Genocide.", dalam *Social Education Vol. 69 No. 6*.
- Dugis, Vinsensio. 2008. "Explaining Foreign Policy Change." dalam *Masyarakat Kebudayaan Politik*. Vol. 21, No. 2.
- Fair, C Chirstine 2006. "Diaspora Involvement in Insurgencies: Insights from Khalistan and Tamil Eelam Movement." Dalam *Nationalism and Ethnic Politics*. Vol. 11. No. 1.
- Farnham, Barbara. 2004. "Impact of the Political Context on Foreign Policy Decision Making." dalam *Political Psychology: International Society of Political Psychology*. Vol. 25, No. 3.
- Fearon, James D. 1998. "Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations", dalam *Annual Review Political Science*. Vol. 1.
- Foyle, Douglas C. 1997. "Public Opinion and Foreign Policy: Elite Beliefs as a Mediating Variable." Dalam *International Studies Quarterly*. Vol. 41. No. 1.
- Gilboa, Eytan, 2005. "Global Television News and Foreign Policy: Debating the CNN Effect." dalam *International Studies Perspectives*, Vol. 6. No. 3.
- Görgülü, aryabas. 2008. "Turkey-Armenia Relations: A Vicious Circle" dalam *Foreign Policy Analysis*. Vol. 8.
- Hermann, Charles. 1990. "Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy." Dalam *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. Vol. 34. No. 1.
- Hough, Peter. 2008. "Make Goals Not War: The Contribution of International Football to World Peace." dalam *International Journal of the History of Sport*. Vol. 25. No. 10.
- Manvel, Sargsian. 2009. "Mountainous Karabakh Is Yet Again at the Epicenter of International Attention". Dalam *ACNIS Policy Brief*. No 4.
- Iskandaryan, Aleksander. 2009. "Armenian-Turkish Rapprochement: Timing Matters." dalam *Insight Turkey*. Vol.11, No.3.
- Kotchikian, Asbed. 2005. "Border Politics: the geopolitical implications of opening the Turkish-Armenian Border." Dalam *Working Paper of Armenian International Policy Research Group*. Vol. 9. No. 5.
- Mikhelidze, Nona. 2010. "The Turkish-Armenian Rapprochement at the Deadlock." Dalam *Istituto Affari Internazionali*. Vol. 10. No. 5.
- Neack, Laura. 2008. "The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era." Dalam *International Studies Quarterly*. Vol. 34, No. 1.
- Nye, Joseph S. 2004. "Soft Power and American Foreign Policy." Dalam *Political Science Quarterly*. Vol. 119. No. 2.
- Safrastyan, Ruben. 2005. "The Recognition of the Genocide in Armenia's Foreign Policy: Multi-Level Analysis." Dalam *21st Century Journal*. Vol. 1.
- Shahnazaryan, David. 2014. "Nervous Neighbors: Five Years After The Armenia-Turkey Protocols." Dalam *Turkish Policy Quaterly*. Vol. 13. No. 3.
- Vidlickova, Alicia. 2012. "Turkish-Armenian Relations and the Issue of the Recognition of the claims of the Armenian genocide." Dalam *Alternatives Turkish Journal of International Relations*. Vol. 11, No. 1.

Pidato

- Oskanian, Vartan. 2009. "Oskanian Rejects Armenia-Turkey Protocols." [Online]. Dalam <http://www.deutscharmenischegesellschaft.de/wpcontent/uploads/2010/02/Oskanian-Rejects-Armenia-Turkey-Protocols-20090922.pdf> [Diakses 5 Mei 2019].
- Sargsyan, Serzh. 2010. "Speech of the President of the Republic of Armenia, in the Chatham House British Royal Institute of International Affairs." [Online]. Dalam http://www.mfa.am/news/inthenews/20100210_president_eng.pdf [Diakses 3 Mei 2019].

Armenia Diaspora. 2010. "Erdogan Warns Armenian Court Ruling Could Derail Protocols." [Online]. Dalam <http://www.armeniadiaspora.com/news/armeniaturkey/1048-erdogan-warns-armenian-court-ruling-could-derail-protocols.html> [Diakses 3 Mei 2019].

Publikasi Institusi

International Association of Genocide Scholars. 2005. "Letter to Prime Minister Erdogan". [Online]. Dalam http://www.genocidewatch.org/images/Turkey-_13Jun05ErdoganletterAmericanHistoricalAssociation.pdf [Diakses pada 11 April 2019].

